

SERTIFIKASI DAN PERMASALAHANNYA

Deswika Khairotul Nisa¹, Sofia Oktoviani², Nurdahlia³, Rizki Ananda⁴

^{1,2,3,4} PGSD FKIP Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

¹ deswikakhairotuln@gmail.com ² oktovianisofia@gmail.com ,

³ dahlianur519@gmail.com ⁴ rizkiananda@universitaspahlawan.ac.id

ABSTRACT

Educators hold a strategic role in the national education system as they are directly involved in the learning process and character development of students. Therefore, improving teacher competence is a top priority for the government in efforts to enhance education quality. The teacher certification program is designed to ensure that every educator meets the established standards of professional, pedagogical, social, and personal competencies. This study aims to examine the implementation of teacher certification policies and the obstacles encountered during the process. The method used is a literature review by analyzing various relevant sources. The findings indicate that certification policies have had a positive impact on teacher professionalism, work motivation, and mastery of technology and effective teaching methods. However, implementation still faces challenges such as complicated bureaucracy, unequal training access between teachers in urban areas and those in 3T regions, and the lack of ongoing evaluation after certification. Additionally, some teachers pursue certification merely to fulfill administrative requirements without fully understanding the essential goal of improving education quality. To address these issues, it is necessary to digitize administrative processes, conduct continuous training, carry out regular evaluations, and provide intensive assistance, especially for teachers in remote areas. With the right strategies and sustainable policy support, teacher certification is expected to become an effective instrument in improving the overall quality of education in Indonesia.

Keywords: *educator competence, quality of education, basic education, evaluation problems, teacher certification*

ABSTRAK

Pendidik memiliki peran strategis dalam sistem pendidikan nasional karena berperan langsung dalam proses pembelajaran dan pembentukan karakter peserta didik. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi pendidik menjadi prioritas utama pemerintah guna meningkatkan kualitas pendidikan. Program sertifikasi guru dirancang untuk memastikan setiap pendidik memenuhi standar kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi kebijakan sertifikasi guru serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan

menganalisis berbagai sumber relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan sertifikasi berdampak positif terhadap profesionalisme guru, semangat kerja, serta penguasaan teknologi dan metode pembelajaran. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti birokrasi yang rumit, ketimpangan akses pelatihan antara guru di kota dan wilayah 3T, serta kurangnya evaluasi pasca-sertifikasi. Sebagian guru juga mengikuti sertifikasi hanya untuk memenuhi syarat administratif tanpa memahami tujuan utamanya. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan digitalisasi administrasi, pelatihan berkelanjutan, evaluasi berkala, dan pendampingan intensif terutama bagi guru di daerah terpencil. Dengan strategi yang tepat dan dukungan kebijakan yang berkelanjutan, sertifikasi guru dapat menjadi instrumen efektif dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia secara menyeluruh.

Kata Kunci: kompetensi pendidik, mutu pendidikan, pendidikan dasar, permasalahan evaluasi, sertifikasi guru

A. Pendahuluan

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dan menjadi fondasi utama dalam menentukan arah dan kemajuan suatu bangsa. Dalam hal ini, guru memegang peran yang strategis sebagai garda terdepan dalam memastikan proses pendidikan berjalan secara berkelanjutan. Peran guru sangat vital karena merekalah yang membimbing dan membentuk karakter generasi penerus agar tumbuh menjadi individu yang berkualitas serta mampu menghadapi tantangan masa depan. (Noviyanti Asyarah et al. 2024) Di Indonesia, guru merupakan komponen inti dalam sistem pendidikan yang memiliki kedudukan penting dan strategis. Keberadaan mereka sangat berpengaruh terhadap peningkatan

mutu pendidikan, mengingat peran mereka yang dominan dalam proses pengajaran. Sebagai bagian integral dari sistem pendidikan, guru terlibat langsung dalam kegiatan belajar mengajar serta memiliki tanggung jawab utama dalam mendidik siswa. Oleh karena itu, kualitas pendidikan ditentukan oleh profesionalisme guru, kompetensi yang dimiliki, serta kepribadian yang baik. Proses pembelajaran yang efektif dan berkualitas hanya dapat terwujud apabila didukung oleh kinerja guru yang optimal. (Suheri, Suja'I, and Sunaryo 2021)

Sertifikasi guru meliputi empat aspek kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogis, profesional, sosial, dan kepribadian. Kompetensi pedagogis mencakup kemampuan

guru dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi kegiatan pembelajaran secara sistematis dan efektif. Kompetensi profesional berkaitan dengan penguasaan materi pelajaran dan keterampilan mengajar yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara itu, kompetensi sosial menggambarkan kemampuan guru dalam membangun komunikasi yang harmonis dan hubungan positif dengan siswa, rekan sejawat, maupun masyarakat luas. Kompetensi kepribadian mencerminkan integritas moral, etika, dan sikap profesional yang harus dimiliki oleh guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. (Diva Muthia Anisa 2024)

Salah satu sasaran utama dari kebijakan sertifikasi bagi guru dan dosen adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan menyeluruh. Berdasarkan hasil analisis, kebijakan tersebut menunjukkan dampak positif, terutama dalam mendorong peningkatan profesionalisme para tenaga pendidik. (Amruzziyad, Naroh Siti 2025). Motivasi kerja guru memiliki peranan krusial dalam pencapaian tujuan pendidikan yang bermutu, karena motivasi secara langsung

memengaruhi kemampuan guru dalam melaksanakan tugas sesuai dengan standar yang ditetapkan. Baik motivasi dari dalam diri (internal) maupun dari lingkungan (eksternal) sangat dibutuhkan agar guru tetap antusias dan fokus dalam menjalankan perannya. Guru dengan tingkat motivasi yang tinggi biasanya lebih proaktif dan kreatif dalam mengelola proses pembelajaran di kelas, sehingga mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif dan akhirnya berpengaruh positif terhadap peningkatan prestasi siswa. (Suheri et al. 2021)

Peningkatan kualitas pendidikan menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional di Indonesia. Dalam konteks ini, guru memegang peranan sentral sebagai pelaku utama proses pembelajaran sangat menentukan keberhasilan pendidikan. Untuk mendukung peran strategis tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan kompetensi profesional pedagogik para pendidik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Sertifikasi ini bertujuan memastikan bahwa guru memenuhi standar

kompetensi yang diperlukan dalam menjalankan tugas profesionalnya, sehingga mampu memberikan kontribusi positif terhadap mutu pembelajaran peserta didik. Namun demikian, meskipun kebijakan ini sudah diterapkan selama beberapa tahun, berbagai tantangan dalam pelaksanaannya masih ditemukan. Beberapa studi menunjukkan adanya peningkatan kompetensi guru setelah mengikuti sertifikasi, namun efektivitas kebijakan ini dalam meningkatkan mutu pembelajaran masih menjadi perdebatan. Di satu sisi, sertifikasi dipercaya mampu meningkatkan motivasi dan kinerja guru, namun di sisi lain terdapat hambatan seperti ketidaksesuaian materi pelatihan dengan kebutuhan nyata di lapangan serta ketimpangan pelaksanaan di berbagai wilayah, yang turut mempengaruhi keberhasilan kebijakan ini secara menyeluruh. (Margolang et al. 2024)

Konteks tersebut memunculkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana kebijakan sertifikasi guru memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pembelajaran peserta didik. Hal ini menimbulkan perenungan apakah kebijakan tersebut telah berhasil mencapai

tujuan utamanya, atau justru masih membutuhkan evaluasi serta penyesuaian di berbagai aspek pelaksanaannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam pengaruh kebijakan sertifikasi guru terhadap mutu pembelajaran peserta didik.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (*library research*) sebagai metode utama untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Metode studi pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, serta dokumen resmi lainnya. Dalam penelitian ini, sumber-sumber literatur yang dijadikan rujukan terutama berkaitan dengan tema peran dan kompetensi guru, motivasi kerja guru, serta pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru di Indonesia.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai hasil penelitian sebelumnya, baik yang bersifat konseptual maupun empiris, dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai pengaruh

sertifikasi guru terhadap kualitas pembelajaran peserta didik. Proses analisis data dilakukan melalui teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan cara mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menyintesis berbagai temuan dari sumber-sumber literatur yang telah dipilih. Analisis difokuskan pada penilaian peran sertifikasi guru dalam peningkatan kompetensi profesional para pendidik serta pengaruhnya terhadap mutu proses pembelajaran di sekolah.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan PP sertifikasi guru merupakan kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan para pendidik. Undang-Undang tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa sertifikasi menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan mutu pendidikan serta taraf hidup guru. Melalui program ini, diharapkan guru dapat menjadi pendidik profesional yang memiliki kualifikasi minimal pendidikan S-1 atau D-4, sekaligus menguasai kompetensi agen pembelajaran. Kompetensi tersebut dibuktikan melalui sertifikat pendidik yang diperoleh setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi. Sebagai implementasi

dari prinsip sertifikasi ini, diperlukan kajian mendalam untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan guru pasca-sertifikasi, yang kemudian dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam menilai efektivitas kebijakan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan. (Syamel Sahara Sitti&Jusman 2024)

Menurut Kunandar (2009) dalam (Musthan and Zur 2022) Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat kepada guru yang telah memenuhi standar kompetensi yang telah ditentukan. Adapun tujuan sertifikasi meliputi: pertama, menilai kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran sekaligus mewujudkan tujuan pendidikan nasional; kedua, meningkatkan kualitas dan proses pendidikan; ketiga, meningkatkan profesionalisme guru. Proses sertifikasi bagi guru yang masih aktif dilakukan melalui pendidikan profesi di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang sudah terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah, yang kemudian diakhiri dengan pelaksanaan uji kompetensi. Program sertifikasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas guru, terutama

dalam pelaksanaan proses belajar-mengajar di kelas. Selain itu, sertifikasi juga berdampak positif terhadap kesejahteraan guru melalui pemberian tunjangan khusus bagi yang telah memiliki sertifikat pendidik. Kualitas pendidikan yang baik sangat ditentukan oleh keberadaan guru yang berkualitas, yakni mereka yang memiliki profesionalisme tinggi, kesejahteraan yang layak, serta mendapatkan penghormatan dari masyarakat.(Herdianti 2024)

Dengan demikian, guru-guru dipersiapkan secara lebih optimal dalam merancang dan menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Kebijakan sertifikasi juga mengharuskan guru untuk menguasai serta mengembangkan setiap materi pelajaran yang akan diajarkan. Penguasaan materi ini menjadi salah satu indikator penting dalam menilai profesionalisme kinerja guru. Hal tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam memberikan perhatian yang serius terhadap para guru di Indonesia. Selain itu, perhatian ini juga ditujukan bagi para siswa sebagai generasi penerus yang kelak akan meneruskan pembangunan bangsa.

Kebijakan sertifikasi memegang peranan penting dalam membantu guru memahami serta menguasai metode dan strategi pengajaran yang efektif, yang menjadi salah satu tolok ukur utama dalam mengevaluasi kinerja guru. Melalui kebijakan ini, kemampuan mengajar para guru mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan sebelumnya. Selain itu, teori ketepatan menyatakan bahwa suatu kebijakan akan lebih efektif jika pelaksanaannya dapat diarahkan secara tepat sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan oleh pemerintah. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa program sertifikasi guru yang dijalankan pemerintah merupakan kebijakan yang sangat positif, karena mampu memotivasi guru untuk terus mengembangkan kualitas diri, khususnya proses pembelajaran di masa yang akan datang.

Namun, jika ditelaah lebih mendalam, masih terdapat sejumlah guru yang mengalami keterbatasan dalam penguasaan teknologi informasi, yang berakibat pada kurang optimalnya peran mereka sebagai pendidik. Pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, antara lain:

pertama, proses sertifikasi yang melibatkan serangkaian tahapan administratif sering kali menjadi beban bagi guru, terutama bagi mereka yang bertugas di daerah terpencil. Kedua, sebagian guru cenderung hanya memenuhi persyaratan administratif tanpa benar-benar memahami esensi dan tujuan sertifikasi. Ketiga, guru di wilayah perkotaan memiliki lebih banyak kesempatan mengikuti pelatihan dibandingkan guru yang berada di daerah 3T (tertinggal, terluar, dan terdepan). Keempat, ketiadaan mekanisme evaluasi pasca-sertifikasi menyebabkan guru kembali menggunakan metode pengajaran yang bersifat konvensional. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru, dibutuhkan beberapa langkah strategis. Pertama, digitalisasi proses administrasi disertai dengan pendampingan intensif bagi para guru akan mempercepat dan mempermudah sertifikasi sekaligus mengurangi beban administratif. Kedua, evaluasi terhadap praktik mengajar guru bersertifikat perlu dilakukan secara rutin, disertai penyediaan pelatihan berkelanjutan guna mempertahankan meningkatkan mutu pembelajaran. Ketiga, pemerintah harus mengalokasikan

dana khusus untuk mendukung pelatihan dan pengembangan kompetensi guru di daerah terpencil. Keempat, pengembangan sistem evaluasi berbasis teknologi menjadi penting untuk memonitor kinerja guru bersertifikat secara berkala, guna memastikan kualitas pendidikan yang berkelanjutan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa guru memegang peranan sentral dalam sistem pendidikan nasional. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas guru menjadi aspek krusial dalam upaya memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia. Kebijakan sertifikasi guru dirancang memperkuat kompetensi pendidik dalam aspek profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian, tujuan mendorong peningkatan profesionalisme kesejahteraan tenaga pendidik. Secara umum, pelaksanaan sertifikasi telah memberikan dampak positif, seperti peningkatan penguasaan teknologi pembelajaran, kemampuan dalam merancang Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), serta penerapan strategi pengajaran yang lebih efektif.

Namun demikian, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain beban administratif yang cukup berat, ketimpangan akses antara guru di daerah perkotaan dan wilayah 3T (tertinggal, terluar, dan terdepan), serta minimnya evaluasi terhadap praktik mengajar setelah sertifikasi. Selain itu, sebagian guru belum sepenuhnya memahami esensi dari sertifikasi sehingga proses ini kerap dianggap sekadar memenuhi persyaratan administratif.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis seperti digitalisasi proses sertifikasi, penyediaan pendampingan intensif, pelatihan berkelanjutan, pengalokasian dana khusus untuk wilayah terpencil, serta pengembangan sistem evaluasi berbasis teknologi. Dengan reformasi menyeluruh, diharapkan kebijakan sertifikasi guru dapat dilaksanakan lebih optimal dan berkelanjutan guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Amruzziyad, Naroh Siti, Muhammad. 2025. "ANALISIS KEBIJAKAN TENTANG SERTIFIKASI PENDIDIK GURU DAN DOSEN.." 10:221–27.
- Diva Muthia Anisa, Dkk. 2024. "Peran Sertifikasi Guru dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Indonesia." 25(1):89–97.
- Herdianti, dkk. 2024. "ANALISIS KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI SMPN 47 SURABAYA." 4:306–15.
- Margolang, Ade Irvan, Azwar Alamsyahdana, Ella Nurmaini, and Dinda Aulia Sani. 2024. "2024 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Dampak Kebijakan Sertifikasi Guru Terhadap Peningkatan Kualitas Pembelajaran Peserta Didik 2024 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin." 2(11):786–91.
- Musthan, Zulkifli, and Sarjanah Zur. 2022. "Sertifikasi Dan Implikasinya Dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru." *AI-TA'DIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan* 15(2):115. doi: 10.31332/atdbwv15i2.3899.
- Noviyanti Asyarah, Wulan, Febriana Wulandari, Yeni Dyan Primasti, and Hendera Wijaya. 2024. "Pengembangan Standar Dan Kualitas Kompetensi Guru Profesional Melalui Program Sertifikasi Di Era Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8(1):14590–99.
- Suheri, Suheri, A. Yusuf Imam Suja'I, and Hadi Sunaryo. 2021. "Pengaruh Sertifikasi Guru Dan Implementasi Program MGMP Pada Motivasi Dan Kinerja Guru." *Jurnal Akuntabilitas Manajemen*

Pendidikan 9(2):189–202. doi:
10.21831/jamp.v9i2.41751.

Syamel Sahara Sitti, Jusman. 2024.
“PERAN SERTIFIKASI GURU
DALAM MENINGKATKAN
KUALITAS PENDIDIKAN DI
SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN NEGERI 5
MAKASSAR.” 5(1):1224–32.